

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Khadijah¹⁾, Intan Juniarti²⁾

¹Akuntansi, Universitas Ibnu Sina

²Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan

dhija@uis.ac.id, intanjuniarti@feb.unrika.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of internal control systems in realizing good governance principles within the Batam City Government. In the context of regional governance, internal control is a crucial element to ensure accountability, transparency, effectiveness, and efficiency in public administration. This study uses a qualitative approach through literature review, referring to regulations such as Government Regulation No. 60 of 2008 on Government Internal Control System (SPIP), and audit findings from the Audit Board of Indonesia (BPK) on Batam City Government. The findings indicate that strengthening internal control components—control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring—has a positive correlation with achieving good governance. This study provides strategic recommendations for internal supervision policy development and enhancing the capacity of local financial management personnel.

Keywords: Good Governance, Internal Control, Local Government, Batam City, SPIP

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem pengendalian internal dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pengendalian internal menjadi elemen krusial untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta laporan dan temuan audit BPK terhadap Pemerintah Kota Batam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, memiliki korelasi positif terhadap pencapaian good governance. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan kebijakan pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.

Kata kunci: Good Governance, Pengendalian Internal, Pemerintah Daerah, Kota Batam, SPIP

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance melalui sistem yang efektif dan efisien, salah satunya adalah sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan landasan normatif yang mengatur tata kelola organisasi sektor publik agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Batam sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia dituntut untuk mampu membangun sistem pengendalian internal yang andal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

Namun, berbagai laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal pada beberapa sektor pemerintahan di Kota Batam. Hal ini menunjukkan perlunya upaya penguatan pengendalian internal sebagai salah satu strategi utama dalam mendorong terwujudnya good governance.

Penelitian ini penulis buat karena tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) dapat mendukung.

kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) dapat mendukung pencapaian prinsip-prinsip tersebut di pemerintahan daerah, khususnya Kota Batam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sistem pengendalian internal dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance di Pemerintah Kota Batam. Melalui studi literatur dan analisis normatif terhadap regulasi serta laporan audit, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan dan praktik pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah.

Batam adalah kawasan ekonomi strategis dan pintu gerbang Indonesia di bagian barat. Dengan statusnya sebagai daerah tujuan investasi dan industri, maka tuntutan terhadap akuntabilitas dan integritas pemerintahannya menjadi sangat tinggi. Penelitian ini akan memberi kontribusi terhadap peningkatan tata kelola daerah yang berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan masyarakat.

Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan Inspektorat mengindikasikan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap penyimpangan, inefisiensi anggaran, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara penguatan SPIP dan kualitas governance di tingkat kota.

Good Governance

Good governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada sistem keterbukaan, akuntabilitas, peran serta, efektivitas, dan supremasi hukum. Good governance mencakup 8 karakteristik utama yang memastikan bahwa kekuasaan dilaksanakan demi kepentingan public. Good Governance menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pemerintahan cutting-edge yang mengharuskan adanya keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan publik, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat (UNDP, 1997).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal (internal control) merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam tiga kategori utama, yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, Efektivitas dan efisiensi operasional,

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai alat pengawasan yang dirancang untuk mengenali, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, SPIP menjadi pilar penting dalam

menjamin keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Kementerian Keuangan RI, 2018)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP terdiri dari 5 elemen kunci: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan. Setiap elemen ini berperan dalam membangun struktur pengendalian yang kokoh dan mendukung terciptanya pengelolaan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan SPIP yang efektif adalah syarat utama untuk mewujudkan Accurate Governance di tingkat pemerintah daerah, karena pengendalian intern yang kuat akan meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan yang menjadi ciri khas pemerintahan yang baik (Susanto, 2020).

Penelitian Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan setempat. Misalnya, penelitian oleh (Susanto, 2020) mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif memberikan dampak positif pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sedangkan penelitian (Sari, Gamayani & Dewi, 2024), menemukan bahwa SPIP menurunkan potensi korupsi dengan accountability sebagai mediator yang signifikan.

Penelitian lainnya terkait fungsi audit internal dan penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud), khususnya di sektor privat (Badara & Saidin, 2013; Bierstaker et al., 2006; Nurdin et al., 2019; Rae & Subramaniam, 2008; Sarens & De Beelde, 2006).

Penelitian ini juga serupa dengan *Internal Control Functions and Good Corporate Governance as Preventive Measures Against Public Sector Accounting Fraud* (IJCAMS, 2024) dimana penelitian ini menemukan sinergi antara fungsi pengendalian internal dan good governance dalam mencegah fraud sektor publik

Penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengendalian Internal sangat efektif dalam hal mencegah dan mendeteksi fraud di lingkungan entitas yang profit-oriented. Namun penelitian yang membahas tentang hubungan pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap pencapaian Good Governance belum banyak yang melakukannya. Khususnya pada perspektif pengendalian internal pemerintah dan pengaruhnya atas pencapaian Good Government Governance versi United Nations (PBB) yang menilai Accountability, transparency, Efficiency dan Effectivity dari suatu instansi pemerintah (UNDP, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada bagaimana penguatan sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Batam berdampak pada pencapaian Good Governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian deskriptif kualitatif**, dengan cara studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) berkontribusi terhadap pencapaian good governance di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk

memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena, praktik, serta kendala dalam penerapan SPIP di sektor publik.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari : Dokumentasi Regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan regulasi terkait lainnya. Dan dari Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2020 hingga 2024. Serta dari Laporan Inspektorat dan hasil evaluasi SPIP oleh BPKP dan sebagiannya penu saya dapatkan dari Jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik pengendalian internal, akuntabilitas publik, tata kelola pemerintahan, dan good governance.

Adapun **proses analisis literatur** dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

Kriteria Pemilihan Sumber yakni: **Relevansi** artinya sumber yang secara langsung membahas tema Pengendalian Internal, Sistem Pengawasan Pemerintah, Good Governance, Manajemen Risiko, Audit Internal, serta pencegahan Fraud di sektor publik. **Kredibilitas** artinya mengutamakan sumber dari jurnal bereputasi Nasional dan Internasional, Laporan BPK, BPKP serta Lembaga Internasional seperti UNDP. **Keterbaruan** artinya prioritas pada literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu 2010 hingga 2024 kecuali dokumen regulasi yang masih berlaku dan relevan hingga saat ini. **Aksesibilitas** Artinya sumber yang dapat di akses secara legal, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan Evaluatif dalam penelitian ini Setiap literatur yang terpilih dievaluasi berdasarkan kualitas metodologinya, validitas hasil penelitian, serta kesesuaian dengan konteks sektor publik dan pemerintahan daerah. Memeriksa apakah temuan dari literatur tersebut mendukung atau bertentangan dengan teori maupun praktik SPIP dan tata kelola pemerintahan yang baik serta Menilai kontribusi literatur terhadap penguatan indikator good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Proses Sintesis Data penulis Melakukan pengelompokan literatur berdasarkan tema, seperti: Keterkaitan unsur SPIP dengan indikator good governance, Faktor penghambat dan pendorong implementasi SPIP, Dampak implementasi SPIP terhadap capaian opini WTP dan kualitas tata kelola, Menyusun matriks analisis untuk membandingkan hasil studi sebelumnya, baik yang relevan secara lokal (nasional) maupun internasional, serta Mengintegrasikan temuan menjadi narasi yang komprehensif untuk membangun argumen dan mendukung hasil penelitian.

Teknik Analisi Data yang digunakan adalah **Analisis Konten (Content Analysis)** yang bertujuan Untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel dari isi dokumen regulasi, laporan audit, dan hasil penelitian terdahulu. Dan **Sintesis Tematik** bertujuan Untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber menjadi kesimpulan yang konsisten dan terstruktur serta **Validasi melalui Triangulasi dengan** tujuan Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas data yang di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

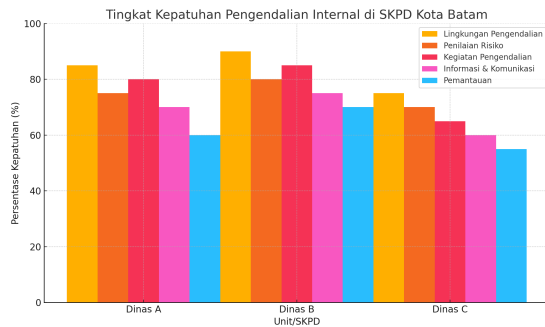
Sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Batam menunjukkan progres dalam implementasi SPIP, namun masih terdapat beberapa kendala, di antaranya:

1. Rendahnya pemahaman dan komitmen pegawai terhadap SPIP dampaknya kurang efektifnya proses pengendalian
2. Keterbatasan SDM dalam unit pengawasan intern dampaknya Audit Internal menjadi kurang optimal
3. Belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan dampaknya terjadi Keterlambatan dalam deteksi kelemahan sistem
4. Komitmen Pimpinan belum maksimal dampaknya penguatan budaya pengendalian belum merata

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, setiap entitas pemerintah wajib membentuk sistem pengendalian internal yang mencakup lima unsur utama. Penguatan pada setiap unsur ini akan mendukung pencapaian indikator good governance, seperti akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, transparansi proses pengadaan barang/jasa, serta efektivitas pelayanan publik.

Korelasi antara SPIP dan good governance juga tercermin dari hasil evaluasi BPK, di mana entitas yang menerapkan SPIP secara baik cenderung memperoleh opini WTP. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal secara konsisten dapat menjadi strategi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Grafik 1. Tingkat Kepatuhan Pengendalian Internal di SKPD Kota Batam



Grafik ini menunjukkan tingkat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada beberapa SKPD di Kota Batam, dengan lima komponen utama pengendalian internal.

Penerapan SPIP yang optimal tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung integritas dan profesionalisme. Hal ini menciptakan sistem kerja yang lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 1 berikut ini menyajikan keterkaitan masing-masing unsur SPIP dengan berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.”

Tabel 1: Keterkaitan Unsur SPIP dengan Indikator Good Governance dan Persentase Kelemahan

Unsur SPIP	Indikator Good Governance dan Persentase Kelemahan	
	Indikator Good Governance yang Didukung	Persentase (%)
Lingkungan Pengendalian	Akuntabilitas	25%
	Etika Pemerintahan	25%
Penilaian Risiko	Efektifitas Perencanaan	10%
Aktivitas Pengendalian	Efisiensi	30%
	Kepatuhan Hukum	30%
Informasi dan Komunikasi	Transparansi	15%
	Partisipasi Publik	15%
Pemantauan	Evaluasi Kinerja	20%
Pemantauan	Tanggung Jawab	25%

Aktivitas Pengendalian adalah unsur SPIP yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. Kelemahan tinggi pada unsur ini di Pemerintah Kota Batam umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Ketidaksesuaian Prosedur Operasional, Banyak SOP yang sudah disusun namun tidak dijalankan secara

konsisten oleh SKPD dan SOP terkait pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian aset tidak diimplementasikan dengan optimal.

2. Pengawasan Internal yang Lemah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan menyeluruh dan Temuan BPK menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD belum memiliki mekanisme kontrol internal yang efektif untuk mencegah kesalahan atau kecurangan.
3. Kurangnya Dokumentasi dan Bukti Pengendalian, Banyak aktivitas pengawasan tidak terdokumentasi dengan baik dan Tidak ada bukti tertulis bahwa review, pemeriksaan, atau validasi terhadap proses telah dilakukan.
4. Budaya Kepatuhan yang Lemah, Masih terdapat persepsi di kalangan pegawai bahwa pengendalian internal adalah tanggung jawab auditor saja, bukan tanggung jawab seluruh manajemen.

Kelemahan pada aktivitas pengendalian berdampak langsung pada efektivitas penggunaan anggaran, antara lain:

1. Penyimpangan Anggaran, Pengeluaran yang tidak sesuai perencanaan, pemborosan, atau kegiatan fiktif dan Realisasi anggaran yang tidak sejalan dengan output dan outcome yang direncanakan.
2. Kelebihan Pembayaran dan Ketidaktepatan, Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa akibat verifikasi dokumen yang lemah dan Pembayaran untuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau belum selesai 100%.

3. Risiko Fraud dan Korupsi Meningkat dalam hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol membuka peluang praktik mark-up, pengadaan fiktif, atau manipulasi laporan keuangan.
4. Program Tidak Berdampak Maksimal, Kegiatan yang dirancang untuk pelayanan publik tidak memberikan manfaat optimal karena pelaksanaan yang tidak sesuai standar dan lemahnya monitoring.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022 atas LKPD Kota Batam, terdapat beberapa temuan yang mencerminkan kelemahan pada aktivitas pengendalian, antara lain:

1. Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pembangunan Gedung, Pada Dinas Pendidikan, terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp 530 juta** kepada kontraktor akibat kekurangan volume pekerjaan. Penyebabnya adalah lemahnya pengawasan lapangan dan kurangnya verifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan.
2. Pengelolaan Aset Tetap yang Tidak Memadai, banyak aset milik Pemko Batam yang belum memiliki dokumen kepemilikan sah atau belum tercatat dengan benar. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengendalian atas pengelolaan aset, berdampak pada potensi kehilangan atau penggunaan aset yang tidak semestinya.
3. Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan, beberapa pengadaan barang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti Berita Acara Serah Terima (BAST). ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi pengendalian dan validasi pembayaran.

4. Keterlambatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial, Dana bansos yang seharusnya disalurkan tahun berjalan tertunda hingga tahun berikutnya akibat kelemahan dalam pengendalian proses administrasi.

Hasil evaluasi tingkat kepatuhan SPIP di SKPD Kota Batam menunjukkan peningkatan signifikan pada kategori 'Sangat Baik' dari 15% pada tahun 2021 menjadi 35% pada tahun 2024.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Pengendalian Internal di SKPD Kota Batam Tahun 2021–2024

Tahun	Tingkat Kepatuhan Pengendalian Internal (%)			
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
2021	15%	45%	30%	10%
2022	20%	50%	25%	5%
2023	25%	55%	18%	2%
2024	35%	50%	13%	2%

Gambar ini menjelaskan Hasil evaluasi tingkat kepatuhan SPIP di SKPD Kota Batam menunjukkan peningkatan signifikan pada kategori 'Sangat Baik' dari 15% pada tahun 2021 menjadi 35% pada tahun 2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting dalam mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Untuk meningkatkan efektivitas SPIP, diperlukan:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengawasan secara berkelanjutan

melalui pelatihan berkala, salah satunya dengan memanfaatkan platform e-learning SPIP yang fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh pegawai pemerintah daerah.

2. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan menyediakan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun teknologi pendukung, sehingga fungsi pengawasan internal dapat berjalan optimal
3. Integrasi teknologi informasi dalam sistem pemantauan dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat deteksi risiko pengelolaan anggaran.
4. Pengembangan modul pelatihan SPIP yang dikustomisasi sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik Pemerintah Kota Batam, termasuk simulasi kasus pengendalian internal nyata untuk meningkatkan pemahaman praktis pegawai.

Pelaksanaan evaluasi dan feedback rutin atas pelaksanaan SPIP, dengan melibatkan stakeholder lintas sektor agar perbaikan sistem pengendalian dapat dilakukan secara dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan pemerintahan.

SARAN

Good Governance dan system pengendalian internal merupakan factor pendorong peningkatan kinerja jadi hendaknya pemerintah daerah kota batam lebih memperhatikan factor tersebut sehingga kinerja suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan baik Dengan implementasi kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dari pemerintah daerah dan Masyarakat meyakini bahwa kegiatan pemerintah sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badara, M. S., & Saidin, S. Z. (2013). The Relationship between Audit Experience and Internal Audit Effectiveness in the Public Sector Organizations. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(3).
<https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v3-i3/224>

Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520–535.
<https://doi.org/10.1108/02686900610667283>

Kementerian Keuangan RI. (2018). In *Modul SPIP Level 3*.

IJCAMS (2024). *Internal Control Functions and Good Corporate Governance as Preventive Measures Against Public Sector Accounting Fraud*

Nurdin, Y., Tahar, F., & Nurbayani, N. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 116.

<https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.312>

Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124.
<https://doi.org/10.1108/02686900810839820>

Sarens, G., & De Beelde, I. (2006). Internal auditors' perception about their role in risk management. *Managerial Auditing Journal*, 21(1), 63–80.

<https://doi.org/10.1108/02686900610634766>

Sari, Gamayani & Dewi (2024) – *International Journal of Economics, Management and Accounting*
<https://doi.org/10.61132/ijema.v1i2.117>

Susanto, A. (2020). Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Publik*, 5(2), 150–164.

UNDP. (1997). *Human Development to Eradicate Poverty*.

UNDP. (2011). *People Centered Development*.